

# PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Oleh:

**DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR.**

Akhirnya setelah penantian panjang lebih dari satu dekade Partai Buruh berhasil mengambil alih kendali parlemen Australia dari kubu tangan Partai Liberal. Hasil pemilihan umum di Australia hari Sabtu (24/11) lalu menunjukkan bahwa Partai Buruh pimpinan Kevin Rudd meraih kemenangan telak dengan menguasai mayoritas kursi di parlemen. Kemenangan ini juga memastikan akan adanya dominasi kekuasaan Partai Buruh di seluruh enam negara bagian dan dua teritori di Australia.

Fakta ini menyiratkan bahwa rakyat Australia menghendaki adanya perubahan setelah sekian lama dipimpin oleh koalisi pemerintahan John Howard. Itu berarti Partai Buruh tampaknya masih perlu menggerakkan dan mengorganisasikan dukungan lebih lanjut dari publiknya dan dari Parlemen. Namun, dengan adanya struktur pembuatan kebijakan luar negeri Australia yang berpusat banyak (*multi centers of decision making*) dewasa ini tidaklah mungkin terjadi perubahan-perubahan yang drastis. Derap pemerintahan Australia yang kini didominasi Partai Buruh dalam penyesuaian diri pada tantangan-tantangan internasional yang baru dan sedang berlangsung tidak akan lebih cepat daripada publik mencapai konsensus. Untuk itu perlu ada perumusan yang lebih jelas dan lebih terperinci mengenai kepentingan Australia di berbagai belahan dunia, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

## **Tinjauan Ke Depan**

Beberapa tahun terakhir ini tampaknya Australia cenderung untuk memainkan peranan yang lebih besar di Asia-Pasifik. Kecenderungan ini berdasar pada kepentingan nasional Australia, walaupun tidak dapat diabaikan ketergantungannya kepada negara-negara sekutunya khususnya Amerika Serikat (AS), serta menyangkut usaha Australia untuk melindungi kepentingan negara-negara industri Barat di kawasan Asia-Pasifik.

**Peranan Australia di Asia-Pasifik berbentuk dua jalur, yaitu jalur pertahanan dan jalur diplomasi. Jalur pertahanan** tercermin dari usaha Australia untuk meningkatkan peranan militernya tetapi hanya bisa dilakukan dengan bantuan dari AS dan melalui kerjasama ANZUS. Sedangkan **jalur diplomasi** dilakukan Australia dengan mendekati baik AS maupun negara-negara Asia-Pasifik khususnya yang terletak di sekitar Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Yang menarik adalah bahwa dalam kedua jalur tersebut, Australia tidak bisa melepaskan diri dari AS. Padahal, salah satu opini publik yang terungkap pada saat masa kampanye pemilihan umum di Australia beberapa waktu lalu memperlihatkan kebingungan terhadap AS. Di kalangan beberapa elemen masyarakat Australia terdapat desakan terhadap pemerintah bahwa Australia seharusnya meningkatkan pertahanan yang mandiri untuk mencegah serangan dari luar, tanpa menggantungkan diri dengan sekutu lainnya yang mungkin tidak mempunyai kepentingan sama dengan Australia. Jalan terbaik untuk memelihara kepentingan AS di Australia, bukan dengan jalan mengutamakan ketergantungan Australia terhadap AS, tetapi dengan mengikuti kebijaksanaan yang melindungi kepentingan nasional Australia dan menunjukkan bahwa Australia sendiri mampu melindungi kepentingan Australia.

Maka itu tidaklah mengherankan apabila pernyataan yang pertama kali disampaikan secara tegas oleh Kevin Rudd setelah dia dipastikan memenangkan pemilu Australia 2007 yakni "Saya tidak ingin kembali ke masa lalu. Saya hanya mau menatap masa depan. Saya akan memerintah dengan mengutamakan kepentingan nasional Australia. Rudd juga berjanji segera menarik pulang sekitar 500 tentara Australia di Irak dan menandatangani Protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim. Kita mafhum bahwa kedua kebijakan Kevin Rudd ini secara telak dan nyata-nyata telah mengabaikan kesepakatan yang dibuat oleh koalisi pemerintahan John Howard dengan AS selama ini. Dengan kata lain, Kevin Rudd sedang berupaya membawa isu perlunya perubahan generasi dan ide-ide segar pada Australia.

Kalau platform kebijakan politik Kevin Rudd seperti termaktub di atas, kini muncul pertanyaan, bagaimana prospek hubungan Australia dengan negara-negara tetangganya, khususnya Indonesia di era kepemimpinan Partai Buruh di Australia?

### **Hubungan Australia - Indonesia**

Khususnya tentang Indonesia, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia secara dinamis mengalami pasang surut pada setiap tahapannya. Pada suatu masa hubungan kedua negara khususnya di tingkat formal antara pemerintah berjalan dengan mesra. Namun di lain waktu hubungan keduanya berjalan dalam suasana tegang, saling menyalahkan, dan penuh dengan retorika pertentangan. Indonesia dan Australia memang sudah ditakdirkan untuk menjadi dua negara yang bertetangga. Secara geografis kedua negara berdekatan tetapi secara kultural kedua bangsa ini sangat berbeda.

**Dari aspek kepentingan nasional, Australia akan tetap mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama,** Indonesia dianggap sebagai negara tetangga yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan Australia. **Kedua,** Indonesia yang telah memasuki tahapan demokrasi yang cukup matang adalah modal utama bagi Australia untuk

mengadakan kontak kelembagaan yang dapat menyebabkan meluasnya pengaruh Australia di Indonesia, khususnya di tataran elit kekuasaan.

**Ketiga**, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama apabila kelembagaan militer Indonesia lebih dapat diandalkan dalam perjuangan Australia melawan terorisme internasional. **Keempat**, walaupun belum sepenuhnya pulih, Australia memandang ekonomi yang stabil dan kokoh akan menjadi jalan bagi terus berlangsungnya hubungan transaksi perdagangan internasional serta terbukanya pasar Indonesia bagi ekspor barang-barang dengan teknologi tinggi Australia di era kawasan perdagangan bebas. **Kelima**, Australia memiliki potensi di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, perdagangan, politik, pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digali oleh pihak Indonesia.

**Lebih lanjut**, kekuatiran terhadap makin berkurangnya simpati negara-negara Dunia Ketiga terhadap Amerika Serikat dikarenakan sepak terjang AS dalam perang global melawan terorisme telah semakin mendesak Australia untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN. Secara geografis, ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia, merupakan wilayah pelindung Australia sehingga kerjasama positif dengan Australia amat membantu penyelesaian masalah bersama.

Dengan mempertimbangkan konstelasi strategis seperti di atas, dalam berhubungan dengan Australia, Indonesia sebenarnya mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) untuk tetap pada posisi yang sederhana, seimbang dan tidak menjadi objek bagi kepentingan unilateral Australia. Dalam konteks diplomasi kontemporer yang dipenuhi dengan berbagai kesepakatan, konvensi, serta kaidah-kaidah yang berlaku secara umum diharapkan masalah-masalah yang timbul diantara kedua negara selalu dapat diselesaikan tanpa merugikan masing-masing pihak. Secara begitu, pencapaian kepentingan tinbal balik yang saling menguntungkan mengharuskan agar beberapa "luka lama" dihapuskan atau diletakkan dalam konteks sejarah sehingga menjadi bagian dari hubungan masa kini diantara Indonesia dan Australia secara proporsional.

Apabila hal itu terjadi, berarti ke depan dimensi sosial dan keniscayaan politik untuk mengakomodasi aspirasi konstituen-konstituen dalam negeri dari hubungan bilateral Australia dan Indonesia akan lebih mengemuka dan turut mempengaruhi hubungan antar pemerintah kedua negara. Bagi Indonesia, hal itu berarti juga bahwa dalam situasi dan kondisi keterbukaan politik saat ini perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak lagi dapat mengabaikan partisipasi berbagai kelompok dalam masyarakat baik kelompok bisnis, LSM maupun kelompok keagamaan. Misalnya saja beberapa kali kunjungan John Howard ke Indonesia beberapa tahun lalu telah kerap mengundang demonstrasi dan reaksi yang beragam dari berbagai elemen masyarakat di tanah air.

Tak pelak lagi pemerintah Indonesia saat ini perlu menunjukkan keseriusannya menjalin kemitraan yang strategis dengan pemerintahan Australia di bawah kepemimpinan Kevin Rudd. Hal itu dikarenakan dilema yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia selama ini sering ditafsirkan oleh elemen domestik Indonesia sebagai sikap tidak tegas pemerintah Indonesia dalam menghadapi arogansi pemerintahan Australia. Karena itu, inilah saatnya bagi kedua bangsa Australia dan Indonesia untuk meningkatkan upaya-upaya membangun hubungan baik atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan antara dua negara yang bertetangga yang pada gilrannya akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pencapaian-pencapaian yang konkrit bagi rakyat kedua negara.

Negara-negara di kawasan tentu mengharapkan jalinan hubungan Australia dan Indonesia tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing tetapi juga untuk memperjuangkan kestabilan dan keseimbangan pengaruh di kawasan Asia-Pasifik.\*\*\*

=====